

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERBATASAN KECAMATAN  
ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU**



**Program Studi Ilmu Pemerintahan**

Oleh:

Tri Handayani  
NIM. E.1031181005

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK**

**2023**

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERBATASAN KECAMATAN  
ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**

Oleh:

Tri Handayani  
NIM. E.1031181005

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**PONTIANAK**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERBATASAN KECAMATAN  
ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU**

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Tri Handayani

NIM. E.1031181005

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



Dr. S. Y Pudjianto, M. Si

NIP. 196011141987031003

Tanggal : 11/9/2023

Dosen Pembimbing Pendamping



Drs. H. Agus Eka, M.Si

NIP.196301231988101001

Tanggal : 11/5/2023

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERBATASAN KECAMATAN  
ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU**

Oleh:

**Tri Handayani**  
**NIM. E.1031181005**

Dipertahankan di : Pontianak  
Pada Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2023  
Waktu : 09.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang 1

**Tim Penguji**

Ketua



Dr. S. Y Pudjianto, M. Si  
NIP. 196011141987031003

Sekretaris



Drs. H. Agus Eka, M. Si  
NIP. 196301231988101001

Penguji Utama



Prof. Dr. Hj. Sri Haryaningsih, M. Si  
NIP. 195709101987032002

Penguji Pendamping



Rulida Yunjarsih, S. IP, M. Si  
NIP. 198306272006042020

Disahkan Oleh:

Dekan Fisip Untan



Dr. Herlan, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197205212006041001

## ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kawasan Perbatasan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau,serta Pemerintah Daerah diharapkan mampu memanfaatkan bangunan tersebut sesuai fungsinya untuk kemajuan daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah di perbatasan dengan menggunakan teori tentang peran Pemerintah Daerah yaitu pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan tipe kualitatif yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran atau pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang terjadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan dengan pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah. Dengan jumlah informan 5 orang, teknik pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah yaitu sebagai pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan yang dapat meningkatkan kawasan perbatasan dengan melihat bangunan yang terdapat di PLBN untuk dapat memanfaatkan keberadaannya dalam memajukan daerah dalam bidang sarana pendidikan, kesehatan, serta lapangan pekerjaan, serta mengembangkan pembangunan dan pemberdayaan yang dapat memberikan pengaruh perubahan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pasar perbatasan dan memperbaiki jalan menuju perbatasan dan mempermudah jalan menuju desa-desa yang ada di Kecamatan Entikong. Selain dari peran Pemerintah Daerah sebagai meningkatkan pelayanan, pembangunan juga terdapat pemberdayaan yang dimana tujuannya dapat mengatasi kemiskinan di daerah perbatasan dan mengurangi pengangguran dengan mengadakan pelatihan serta arahan kepada masyarakat agar dapat menambah pengetahuan pengembangan daerah khususnya di perbatasan.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Pembangunan, Kawasan Perbatasan

## ABSTRACT

This thesis writing is intended to describe and analyze the role of local government in enhancing the development in the border area of Entikong District, Sanggau Regency. In this case, the local government is expected to be able to use the building according to its function for regional development. The purpose of this study is to describe the role of local government at the border area by using the theory of local government's roles, such as service, development and empowerment. The research method used in this study was a descriptive research type using a qualitative type which is intended to get an in-depth description or understanding of the problems that occurred to improve the welfare of people who live at the border area with development done by the government. There were 5 informants in this study. The data collection techniques are observation, documentation and interviews. The results of this study indicated that the role of the Regional Government is as a service, development, and empowerment that can improve the border area. By looking at the buildings in the border post (PLBN), it is expected to take advantage of its existence in advancing the area in the fields of education, health, and employment facilities, as well as increasing the development and empowerment affecting the economic growth in the border market and improving roads to the border which make it easier to go to the villages at Entikong district. Apart from the role of the Regional Government to improve services and developments, it also has empowerment role where the goal is to overcome poverty at border areas and to reduce unemployment by conducting training and guiding the community so that they can increase knowledge of regional development, especially at the border areas.

Keywords: Local Government, Development, Border Area



## **RINGKASAN SKRIPSI**

Skripsi ini berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kawasan Perbatasan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau”. Judul ini dipilih karena melihat peran pemerintah pada pengelolaan pembangunan yang dilakukan di kawasan perbatasan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pengelolaan Pembangunan di Kawasan Perbatasan Kecamatan Entikong.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan tipe kualitatif yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran atau pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan Kecamatan Entikong dalam mengelola pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Ketika menetapkan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terdiri dari kamera (*handphone*) dan merekam pelaksanaan wawancara, pedoman wawancara serta *flash disk*. Ketika data yang diperoleh telah terkumpul selanjutnya peneliti melakukan proses Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*) dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Entikong diharapkan dapat memberi kemajuan daerah

perbatasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di perbatasan. Perubahan pembangunan PLBN rampung sejak tahun 2016 lalu, pada masa itulah kawasan entikong mulai adanya perubahan bangunan yang dulunya masih terlihat kumuh direnovasi kembali agar lebih baik dan rapi. Hal ini banyak merubah kawasan setempat menjadi lebih teratur dan terlihat perkembangan daerahnya, tetapi tidak berhenti di bangunan saja Pemerintah setempat juga harus dapat meningkatkan perkembangan daerah nya dengan memanfaatkan keberadaan PLBN agar menjadi daerah yang memiliki potensi yang bisa memberikan kemajuan perekonomian daerah Kecamatan Entikong dan masyarakatnya.

Berdasarkan temuan masalah dalam penelitian ini maka penulis memberikan saran untuk peran Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan ditingkatkan fasilitas penunjang seperti pendidikan dengan sarana prasarana yang baik, kesehatan dan fasilitas tempatnya, serta membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Selain dari pelayanan juga terdapat pembangunan yaitu peran pemerintah dalam hal pembangunan harus lebih diperhatikan lagi agar program rencana yang sudah dibuat maupun masih dalam pelaksanaan agar terealisasi dengan baik, dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat agar dapat digunakan sesuai fungsi pembangunannya. Pemberdayaan, peran pemerintah dalam hal ini yaitu lebih memperdulikan masyarakat untuk dapat melaksanakan kegiatan dalam perkembangan daerah dengan cara memberi arahan serta dukungan agar masyarakat mampu dan paham bagaimana menjalankan kehidupan di pesisir perbatasan.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Tri Handayani

Nomor Mahasiswa : E.1031181005

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Maret 2023

Yang membuat persyaratan



Tri Handayani

NIM. E.1031181005

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Tidak Semua Bunga Tumbuh dan Mekar Bersamaan, Maka Jangan Samakan  
Proses Mu dan Orang Lain”

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kesehatan kepada saya. Maka dengan ini saya persembahkan tulisan ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi, yaitu Bapak Agus Mulyana dan Ibu Hasiah yang telah senantiasa memberikan semangat, dukungan, doa, pengorbanan, serta nasehat dalam setiap langkah yang saya lakukan dalam menjalankan perkuliahan hingga saat ini. Semoga skripsi ini bisa menjadi hadiah untuk kedua orang tua saya atas pencapaian yang sangat luar biasa untuk membuktikan bahwa mereka telah berhasil dalam memberikan pendidikan terbaik untuk anak bungsu nya ini.
2. Kedua saudara kandungku, Dewi Astarina dan Supiati beserta abang iparku Wahyu Trimukti dan Deki terimakasih selalu memberikan dukungan dan suntikan dana untuk memotivasi adik kalian ini menjadi semangat untuk menjalani kehidupan di perantauan.
3. Kepada orang yang selalu ada dari awal perkuliahan yaitu Bripda Putra Setiawan, terimakasih telah menjadi pacar terbaik yang saya temui hingga saat ini.

4. Kepada sahabat dan teman-teman yang selalu ada di setiap proses perjalanan hidup saya dan perkuliahan yaitu (Benozzi Tamrin, S.AP), (Shalsabila QR, S.Ak), (Adi Saputra), (Yuni Astini, A.Md.Kep), (Dwi Resty M, S. Farm), (Laras Prabawaringin, S.IP), (Indri Damayanti, S.IP), (Melina JatiPertiwi, S.IP), (Dia NurAini, S.IP), serta para bestie terbaik saya yang tidak dapat disebutkan semuanya.
5. Teman-teman Mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 dan kelompok KKM Condong Singkawang, terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada saya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul : “**Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kawasan Perbatasan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau**”. Dimana Skripsi ini adalah tahap atau proses peneliti untuk melakukan studi penelitian di Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis dan bimbingan yang sangat mendorong dari dosen pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Herlan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bima Sujendra, S. IP, M. Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Dr. S. Y Pudjianto, M. Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

5. Drs. H. Agus Eka, M. Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan selaku Dosen Pembimbing Kedua yang selalu sabar memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Prof. Dr.Hj. Sri Haryaningsih, M.Si selaku Dosen Penguji Utama yang senantiasa memberikan masukan dalam kesempurnaan penulisan Skripsi ini.
7. Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si selaku Dosen Penguji Kedua yang senantiasa memberikan masukan dan arahan dalam memperbaiki Skripsi ini.
8. Dosen-dosen pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan selama dalam perkuliahan.
9. Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, serta Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang membantu dalam perkuliahan dan penulisan Skripsi ini.
10. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, Kecamatan Entikong, serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang telah bersedia membantu dalam penelitian ini serta dapat menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi dalam mendukung penulisan Skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis dan tidak mengurangi terimakasih penulis terhadap bantuan-bantuan yang diberikan sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala kebaikan, bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, dan karya yang penulis buat ini dapat

menjadi sumbangan suatu pemikiran yang bermanfaat dan cukup berarti bagi semua pihak yang memerlukannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dilakukan oleh penulis baik dalam segi penulisan maupun dalam penyajian materi yang telah di paparkan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, guna memperbaiki Skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Pontianak, 05 Februari 2023

Tri Handayani

E.1031181005

## DAFTAR ISI

*Halaman*

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	11
1.3 Fokus Penelitian .....	11
1.4 Rumusan Masalah .....	12
1.5 Tujuan Penelitian .....	12
1.6 Manfaat Penelitian .....	12
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	13
1.6.2 Manfaat Praktis .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Definisi Konsep.....	14
2.1.1 Peran .....	14
2.1.2 Pemerintah Daerah .....	16
2.1.3 Pembangunan .....	19
2.1.4 Pengelolaan Perbatasan .....	21
2.2 Teori .....	23

2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan .....	30
2.4 Alur Pikir Penelitian.....	32
2.5 Pertanyaan Penelitian .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	36
3.2 Langkah-langkah Penelitian.....	37
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.3.1 Lokasi Penelitian .....	39
3.3.2 Waktu Penelitian .....	39
3.4 Subjek dan Objek Penelitian .....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.6 Alat Pengumpulan Data .....	43
3.7 Analisis Data .....	43
3.7.1 Keabsahan Data .....	43
3.7.2 Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Entikong .....	47
4.1.1 Letak Geografis .....	48
4.1.2 Sejarah Pemerintahan .....	49
4.1.3 Organisasi Visi dan Misi .....	52
4.2 Kondisi Demografi.....	53
4.3 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Sanggau .....	58
4.3.1 Sekretariat Daerah .....	58
4.3.2 Visi dan Misi .....	59
4.3.3 Struktur Organisasi .....	60
4.4 Badan Nasional Pengelola Perbatasan .....	61

4.4.1 Pos Lintas Batas Negara Kecamatan Entikong.....	61
4.4.2 Visi dan Misi BNPP .....	61
4.4.3 Struktur Organisasi Pengelola PLBN .....	62
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
5.1 Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kawasan Perbatasan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau .....	65
5.1.1 Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan .....	66
5.1.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pembangunan.....	76
5.1.3 Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pemberdayaan.....	82
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
6.1 Kesimpulan.....	89
6.2 Saran.....	91
6.3 Keterbatasan Penelitian .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	10
Tabel 3.1.1 Waktu Penelitian .....	40
Tabel 4.2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender dan KK .....	54
Tabel 4.2.2 Jarak Tempuh Dari Desa ke Ibu Kota .....	55
Tabel 4.2.3 Jumlah Sarana Kesehatan.....	55
Tabel 4.2.4 Jumlah Desa Yang Berbatasan Dengan Negara Tetangga .....	56
Tabel 4.2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	57
Tabel 5.1.1 Ketersediaan Sarana Pendidikan .....	67
Tabel 5.1.2 Jumlah Tenaga Guru di Kecamatan Entikong.....	68
Tabel 5.1.3 Banyaknya Sarana Prasarana Kesehatan.....	69
Tabel 5.1.4 Jumlah Tenaga Medis Di Kecamatan Entikong .....	69
Tabel 5.1.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian .....	75
Tabel 5.1.6 Banyaknya Sarana Prasarana Ekonomi.....	77
Tabel 5.1.7 Kondisi Jalan Darat Antar Desa .....	77
Tabel 5.1.8 Jumlah dan Keberadaan Kartu Keluarga Miskin .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1 Perubahan PLBN Sebelum Dan Sesudah Pembangunan .....	4
Gambar 1.1.2 Data Kedatangan Di Pintu Perbatasan.....	9
Gambar 2.4.1 Alur pikir Penelitian .....	34
Gambar 4.1.1 Peta Wilayah Kecamatan Entikong .....	48
Gambar 4.3.1 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Kab. Sanggau.....	60
Gambar 4.4.1 Kelembagaan Unit Pengelola PLBN .....	63
Gambar 4.4.2 Bagan Struktur Unit Pengelola PLBN.....	64
Gambar 4.4.3 Kebijakan Pengelola PLBN.....	64

## DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara .....	97
Panduan Observasi .....	99
Daftar Subjek Penelitian.....	100
Dokumentasi Penelitian .....	101
Surat Tugas BPPD.....	105
Surat Tugas Kantor Camat Entikong.....	106
Surat Tugas PLBN.....	107
Balasan Surat Penelitian .....	108
Biodata Peneliti .....	109

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan merupakan arti sebagai proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan dari yang kurang baik menjadi baik melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan.

Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu Negara.

Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak di sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah Negara kawasan perbatasan ada di Kecamatan yang secara hukum berada pada tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten/Kota.

Perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dapat dilihat bahwa pengelolaan Perbatasan Negara merupakan bagian dari pembangunan nasional sehingga memiliki

kedudukan tertentu terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, agar rencana yang sudah disusun dapat implementatif sebagaimana mekanisme pembangunan nasional. Dilihat dari kawasan perbatasan yang memiliki letak wilayah yang strategis hal ini dapat menjadi salah satu agenda pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu tentang mengembangkan wilayah dan mewujudkan daerah tertinggal di kawasan kawasan perbatasan agar meningkatkan kemajuan, dan memperkuat daya saing dengan Negara tetangga. Pandangan tersebut merupakan bagian integral dari visi misi agenda Nawa Cita Presiden RI, untuk itulah pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (InPres) No. 6 tahun 2015 tentang “Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan”.

Pengelolaan kawasan perbatasan umumnya masih ditangani oleh Pemerintah Pusat. Selain sifatnya masih parsial dan kurang terkoordinasi, kinerja yang dicapai juga belum menggembirakan. Dengan melihat kondisi tersebut maka sangatlah perlu dan penting apabila kelembagaan Pemerintah Daerah perbatasan menjadi *priority agenda*. Hal demikian patut menjadi perhatian Pemerintah Pusat untuk memberikan jalan keluar melalui penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah pada wilayah-wilayah perbatasan. Tujuan pengelolaan ini adalah untuk mendorong pengembangan kawasan wilayah perbatasan yang dimana sebagai pintu masuk perbatasan Negara, yang letaknya berada pada

wilayah administrasi Pemerintah Daerah otonomi, yakni wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebagai langkah awal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau adalah dengan menerbitkan berbagai Peraturan Daerah yang digunakan untuk melindungi dan mengatur elemen masyarakat terutama pada masyarakat yang berada di wilayah kawasan perbatasan di Kecamatan Entikong untuk senantiasa mendukung setiap langkah dalam melakukan pembenahan terhadap lingkungan untuk menuju suatu pembangunan yang dapat berupaya dalam pengelolaan pembangunan di perbatasan. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau, yang mana dijelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai urusan dalam mengelola dan meningkatkan daerah kawasan perbatasan Kecamatan Entikong. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintahan Daerah dengan adanya otonomi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah Negara.

Renovasi PLBN Entikong rampung sekitar tahun 2015-2016 lalu. Usai perubahan pembangunan dirapikan, pintu perbatasan Indonesia ini berubah menjadi kebanggaan baru. Perkembangan pembangunan PLBN di Kecamatan Entikong diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan dibangun pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat di kawasan perbatasan. Proses pembangunan tidak hanya terfokus pada PLBN saja tetapi pemerintah

akan membangun infrastruktur penunjang seperti jalan raya agar kawasan tersebut menjadi semakin lebih baik.

Daerah Kecamatan Entikong menjadi salah satu kawasan perbatasan antar Negara tetangga yaitu Serawak Malaysia, yang dapat dikatakan sebagai jalur darat yang mempunyai akses jalan yang mudah untuk dilewati oleh pengendara dari Indonesia ataupun Malaysia tanpa harus menyeberangi sungai maupun laut, dengan begitu mudahnya akses perjalanan menuju negara tetangga membuat daerah perbatasan menjadi fokus utama pada pemerintahan Presiden RI untuk meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan agar dapat menjadi kebanggaan baru pintu masuk gerbang perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia.

**Gambar 1.1.1**  
**Perubahan PLBN Sebelum dan Sesudah Pembangunan**



Sumber: *Kementerian PUPR 2016*

Adanya perubahan di kawasan perbatasan dapat dilihat dari perkembangan PLBN yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebelum dan sesudah pembangunan. Hal ini juga bagian dari tantangan masyarakat setempat agar terbiasa dengan kebijakan dan peraturan baru yang diterapkan oleh PLBN sebagai daerah perbatasan. Selain pembangunan PLBN, di Kecamatan Entikong juga telah dibangun pasar tradisional yang dimana tujuannya untuk kemajuan perekonomian masyarakat di perbatasan. Tetapi bangunan itu hingga sekarang belum banyak menarik minat masyarakat dan hanya beberapa ruko saja yang masih bertahan untuk berjualan disana. Lama-kelamaan keadaan seperti ini akan menjadi kerugian pemerintah karena bangunan yang sudah bagus tidak dikelola baik dari pemerintah daerah untuk kemajuan kawasan perbatasan.

Perencanaan pembangunan daerah perbatasan dimaksud agar dapat memberikan perkembangan daerah terutama dalam perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu rencana pemerintah melakukan perkembangan yaitu dapat memberi kemajuan dalam meningkatkan fungsi pemerintah sebagai pelayanan seperti pendidikan, fasilitasi kesehatan, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat perbatasan serta fungsi pembangunan yang dapat memberikan perubahan fisik daerah agar terlihat memadai sebagai daerah perbatasan. Selain itu, pemerintah juga berfungsi sebagai pemberdayaan yang dimana dapat menjadi pendorong bagi masyarakat agar dapat meningkatkan

kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat perbatasan, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Kegiatan pembangunan di Kecamatan Entikong, fungsi Camat hanya sebatas menyusun rencana pembangunan dan mengusulkan kepada instansi teknis sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan diantaranya melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Disamping itu, Camat bertugas mengamankan kebijakan Pemerintah, terutama kebijakan Pemerintah Daerah. Sedangkan proses pelaksanaan pembangunan dikelola langsung oleh instansi teknis, baik instansi teknis Daerah, Provinsi maupun pusat sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Saat ini telah dibangun berbagai fasilitas di Kecamatan Entikong baik oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat yang berskala besar diantaranya :

1. Pembangunan Perumahan Taman Perbatasan Indah Entikong.
2. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
3. Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong.
4. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Entikong.
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Entikong.
6. Jalan batas kabupaten Entikong – Suruh Tembawang.
7. Pembangunan Pasar Tradisional Entikong.

8. Balai Latihan Kerja (BLK) Entikong.
9. Pembangunan perkantoran stasiun karantina Ikan, Tumbuhan dan Kesehatan.
10. Pembangunan sarana dan prasarana Bea dan Cukai Entikong (perbatasan).
11. Stasiun RRI Perbatasan Entikong.
12. SMPN 4 Satu Atap Serangkang.
13. Mess Terpadu di Suruh Tembawang.
14. Mess Terpadu Kecamatan Entikong.
15. Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Entikong.
16. Jaringan seluler Telkomsel di Suruh Tembawang dan Badat.
17. Jembatan gantung di Suruh Tembawang dan Pala Pasang.
18. Kampus STKIP Melawi Cabang Entikong.
19. SPBU BBM di Kecamatan Entikong.
20. Pembangunan *dryport* Entikong.

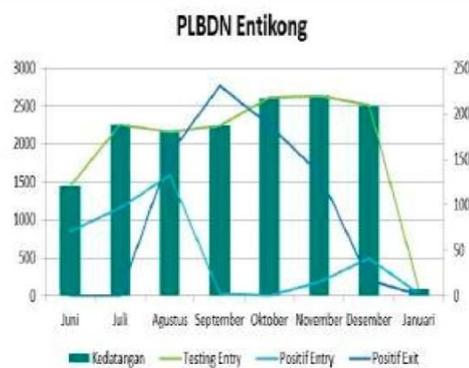
Camat yaitu sebagai koordinator wilayah harus dapat memastikan bahwa semua proyek nasional dan daerah harus berjalan lancar dan sukses serta teroperasikan dengan baik. Pembangunan yang telah dilakukan pemerintah menjadi kebanggaan bagi perkembangan di suatu daerah apalagi di daerah perbatasan. Dari beberapa pembangunan tersebut nantinya akan menjadi tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan terlaksananya pengelolaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan.

Sebelum adanya perubahan PLBN kawasan perbatasan terlihat belum tertata dengan baik dan desain pembangunan yang kurang menarik,

sehingga pusat ekonomi dan juga kunjungan wisatawan berkurang. Pasar yang ada di Entikong yang menjadi pusat perkembangan ekonomi daerah juga terlihat tidak begitu ramai dikunjungi. Dengan adanya pembangunan gedung PLBN yang selesai pada tahun 2016 kawasan perbatasan Entikong mulai terlihat perkembangannya dari infrastruktur jalan, sarana prasarana penunjang di perbatasan seperti pusat wisata perbatasan, perkembangan pusat ekonomi pasar, dan meningkatkan jumlah pengunjung yang melintas di PLBN menggunakan paspor.

Pembangunan PLBN di perbatasan Entikong terlihat rapi dan tersusun dengan memperbaiki gedung PLBN dan instansi-instansi pemerintah, mess pegawai, tempat ibadah, dan perkembangan pasar baru Entikong yang menjadi tempat masyarakat sekitar untuk berjualan dan memberikan daya tarik bagi para pengunjung perbatasan. Tetapi tidak semua fasilitas yang dibangun berfungsi dengan baik, maka dari itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal meningkatkan pembangunan dan mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam hal memanfaatkan adanya bangunan PLBN.

**Gambar 1.1.2**  
**Data Kedatangan di Pintu Masuk Entikong Periode Juni 2021 – 4**  
**Januari 2022**



Sumber: *Kemenkes RI 2022*

Data di atas dapat menunjukkan bahwa setelah pembangunan PLBN suasana di perbatasan kini semakin ramai dikunjungi pelintas yang ingin ke Malaysia ataupun ke Indonesia. Kegiatan ekonomi mulai berjalan dengan adanya perdagangan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat perbatasan dengan Negara tetangga melalui PLBN tersebut.

Dampak dari terjadinya perubahan di perbatasan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau diharapkan dapat menjadi manfaat bagi perkembangan pengelolaan pembangunan di kawasan perbatasan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial masyarakat. Posisi Entikong yang menjadi daerah perbatasan memang menyebabkan ketertinggalan wilayah, karena tempatnya yang kurang diperhatikan dari dimensi pembangunan. Kesejahteraan masyarakat yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan di suatu daerah dapat dilihat dari hasil data BPS Kabupaten Sanggau yang menunjukkan tingkat pendidikan

masyarakat di perbatasan, berikut tabel data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut.

**Tabel 1.1.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Entikong**

No	Desa	Tidak Tamat SD	Tamat			Perguruan Tinggi		
			SD	SMP	SMA	Dipl	S1	S2
1	Entikong	1.070	1.418	1.396	268	14	25	5
2	Semanget	413	955	96	64	6	8	0
3	Nekan	407	818	165	75	2	5	0
4	Pala Pasang	370	277	58	17	0	0	0
5	Suruh Tembawang	539	416	57	21	2	4	2
<b>Jumlah</b>		<b>2.799</b>	<b>3.884</b>	<b>1.772</b>	<b>445</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>7</b>

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau 2019*

Berdasarkan hasil yang peneliti dapat dari BPS Kabupaten Sanggau terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih rendah dari jumlah penduduk desa yang berada di Kecamatan Entikong data diketahui masyarakat yang berpendidikan SD 3.883, SMP 1.772, SMA 445, Perguruan Tinggi 73, dan yang tidak tamat SD berjumlah 2.799. Untuk itulah betapa pentingnya pendidikan bagi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, kemajuan daerah dapat dilihat dari perkembangan sumber daya manusia dan juga pembangunan infrastruktur penunjang seperti memberikan fasilitas kesehatan yang cukup, membuka lapangan pekerjaan dengan dapat memanfaatkan dari adanya PLBN, dan

membuka sektor perekonomian di perbatasan. Dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan dengan menerapkan fungsi pemerintah sebagai memenuhi pelayanan dan kebutuhan masyarakat, meningkatkan infrastruktur pembangunan, serta pemberdayaan agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Hadirnya PLBN berdampak pada berbagai macam aspek dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lapangan pekerjaan, dan infrastruktur pembangunan.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Perlu adanya dorongan dari Pemerintah Daerah untuk dapat memanfaatkan bangunan yang tersedia di kawasan pasar entikong.
2. Perkembangan daerah terhambat di karenakan fasilitas penunjang masih berkurang.
3. Pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan melibatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.

## **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka fokus penelitian yakni pada peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pembangunan fisik di kawasan perbatasan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau.

Penelitian ini difokuskan hanya dilingkup Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan bangunan fisik di kawasan perbatasan di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dengan kriteria yang telah ditentukan peneliti.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pembangunan fisik di kawasan perbatasan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau?”.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pembangunan fisik di kawasan perbatasan Kecamatan Entikong.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang membahas Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pembangunan di Kawasan Perbatasan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi tambahan dalam kajian keilmuan dan pengetahuan dalam studi Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah di Kawasan Perbatasan dan penelitian ini dapat dijadikan kajian literatur tambahan bagi peneliti lain dalam Pembangunan di Kawasan Perbatasan PLBN.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan pengelolaan pembangunan di Kawasan Perbatasan agar terciptanya masyarakat yang sejahtera.
2. Bagi penulis dapat menambahkan wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta mampu menerapkan teori-teori yang telah penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan pada program studi Ilmu Pemerintahan yang penulis tempuh selama ini.
3. Bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan dan partisipasi tentang mendukung pengelolaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan mengoptimalkan perekonomian daerah perbatasan.